



Kalpataru

**JURNAL SEJARAH DAN
PEMBELAJARAN SEJARAH**



Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan IPS
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia
Palembang



**Nilai-Nilai Sejarah Rumah Limas Seratus
Tiang di Desa Sugih Waras Kabupaten
Ogan Komering Ilir Sebagai Sumber
Pembelajaran Sejarah Lokal**

Natasyah Maharanis, Kabib Sholeh, Wandiyono

**Konsep Batanghari Sembilan dalam
Sejarah dan Kebudayaan Melayu Sumatera
Selatan Sebagai Sumber Pembelajaran
Sejarah Lokal**

Ana Mardiana, Muhamad Idris, Wandiyono

**Pluralisme dalam Kain Tenun Songket
Palembang Sebagai Sumber Pembelajaran
Sejarah**

*Sahadat, Muhamad Idris, Eva Dina
Chairunisa*

**Tinjauan Historis Akulturasi Budaya dalam
Kuliner Palembang Sebagai Sumber
Pembelajaran Sejarah**

*Fatma Dwi Oktaria, Muhamad Idris, Aan
Suriadi*

**Pemanfaatan Teknologi (LCD dan Aplikasi
Power Point) dengan Model Pembelajaran
Talking Stick dalam Pembelajaran Sejarah**

Faruq Hasan Asy'ari, M. Zaki Haqibillah

**Koleksi Museum dr. Adnan Kapau Gani
Palembang Sebagai Pembelajaran Sejarah
di SMA Methodist 3 Palembang**

*Olivia Dwi Saniyah, Kabib Sholeh, Dina Sri
Nindiati*

**Eksistensi Istana Adat Kesultanan
Palembang Darussalam Sebagai Wadah
Pelestarian Adat Budaya Palembang
Tahun 2004-2020**

*Harlis Suhayat, Zaza Yulianti Amelia,
Syarifuddin, Supriyanto*

**Telaah Konseptual Pendekatan Kuantitatif
dalam Sejarah**

Arditya Prayogi

**Pengaruh Revolusi Hijau Terhadap
Perubahan Sosial Ekonomi Petani di
Kabupaten Karanganyar Tahun 1969-1998**

Aris Agus Styawan

**Eksistensi Pengrajin Gerabah di Kelurahan
Kedaton Kecamatan Kayu Agung Tahun
1980-2020**

*Syarifuddin, Supriyanto, Adinda Putri Wiryani,
Niswaton Hasibah, Vina Anjelina*

Kalpataru

Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah
Volume 8, Nomor 1, Juli 2022

Chief Editor

Drs. Sukardi, M.Pd.

Editor

Dr. Muhamad Idris, M.Pd.
Eva Dina Chairunisa, M.Pd.
Jeki Sepriady, S.Pd.

Reviewer

Dr. Tahrun, M.Pd.	(Universitas PGRI Palembang)
Drs. Supriyanto, M.Hum.	(Universitas Sriwijaya Palembang)
Dra. Retno Purwati, M.Hum.	(Balai Arkeologi Sumatera Selatan)
Dr. Nor Huda Ali, M.Ag., M.A.	(Masyarakat Sejarawan Indonesia Sumsel)
Dr. Budi Agung Sudarman, S.S., M.Pd.	(Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan)
Dr. Purmansyah, M.A.	(Universitas Muhammadiyah Palembang)

Alamat Redaksi

Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang
Telp. 0711-510043
Email: jurnalkalpatarusejarah@gmail.com
Website: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Kalpa>

Kalpataru

JURNAL SEJARAH DAN
PEMBELAJARAN SEJARAH

Terbit dua kali setahun pada
Juli dan Desember

Diterbitkan oleh:
Program Studi Pendidikan
Sejarah
Jurusan Pendidikan IPS
Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Palembang

Gambar Cover:
Pohon Kalpataru
Candi Prambanan



Koleksi: Muhamad Idris

DAFTAR ISI

Nilai-Nilai Sejarah Rumah Limas Seratus Tiang di Desa Sugih Waras Kabupaten Ogan Komering Ilir Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Lokal <i>Natasyah Maharanis, Kabib Sholeh, Wandiyono.....</i>	1-10
Konsep Batanghari Sembilan dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu Sumatera Selatan Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Lokal <i>Ana Mardiana, Muhamad Idris, Wandiyono</i>	11-21
Pluralisme dalam Kain Tenun Songket Palembang Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah <i>Sahadat, Muhamad Idris, Eva Dina Chairunisa.....</i>	22-30
Tinjauan Historis Akulturasi Budaya dalam Kuliner Palembang Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah <i>Fatma Dwi Oktaria, Muhamad Idris, Aan Suriadi.....</i>	31-47
Pemanfaatan Teknologi (LCD dan Aplikasi Power Point) dengan Model Pembelajaran Talking Stick dalam Pembelajaran Sejarah <i>Faruq Hasan Asy'ari, M. Zaki Haqibillah</i>	48-52
Koleksi Museum dr. Adnan Kapau Gani Palembang Sebagai Pembelajaran Sejarah di SMA Methodist 3 Palembang <i>Olivia Dwi Saniyah, Kabib Sholeh, Dina Sri Nindiati</i>	53-65
Eksistensi Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam Sebagai Wadah Pelestarian Adat Budaya Palembang Tahun 2004-2020 <i>Harlis Suhayat, Zaza Yulianti Amelia, Syarifuddin, Supriyanto</i>	66-75
Telaah Konseptual Pendekatan Kuantitatif dalam Sejarah <i>Arditya Prayogi.....</i>	76-85
Pengaruh Revolusi Hijau Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Petani di Kabupaten Karanganyar Tahun 1969-1998 <i>Aris Agus Styawan.....</i>	86-102
Eksistensi Pengrajin Gerabah di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayu Agung Tahun 1980-2020 <i>Syarifuddin, Supriyanto, Adinda Putri Wiryani, Niswaton Hasibah, Vina Anjelina</i>	103-110

**PENGARUH REVOLUSI HIJAU TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI PETANI DI
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 1969-1998**

Aris Agus Styawan

Mahasiswa Magister Program Studi Sejarah FIB Universitas Gadjah Mada

Email: arisagusstyawan@gmail.com

ABSTRAK

Sejumlah kajian yang membahas tentang revolusi hijau sepanjang tahun 1970-an sampai 1990-an banyak menampilkan perdebatan hasil studi yang cukup menarik salah satunya tentang dampak yang ditimbulkan oleh revolusi hijau terhadap kehidupan sosial ekonomi petani pedesaan. Akan tetapi kajian-kajian yang ada sebagian besar hanya terpusat di beberapa daerah di Jawa dan menempatkan bahwa revolusi hijau telah mengubah secara menyeluruh wajah masyarakat petani pedesaan menjadi petani komersial. Walau sudah setengah abad lebih sejak pelaksanaan kebijakan tersebut, kajian tentang revolusi hijau masih menarik untuk diteliti lebih lanjut. Melalui penggunaan metode sejarah, tulisan ini bertujuan mengungkap pengaruh revolusi hijau terhadap perubahan sosial ekonomi petani pedesaan di Kabupaten Karanganyar tahun 1969-1998. Tulisan ini dibangun dengan memanfaatkan berbagai sumber arsip terutama dari catatan statistik, peraturan hukum daerah, koran dan majalah, serta didukung adanya data hasil wawancara. Diargumentasikan bahwa adanya penggunaan teknologi baru dan peningkatan hasil usaha tani tidak serta merta mengubah secara keseluruhan kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat petani Kabupaten Karanganyar menjadi petani komersial. Terdapat sebagian masyarakat petani pedesaan yang memilih tetap menggunakan prinsip dahulukan selamat dan menjaga etika subsistensi.

Kata Kunci: *Revolusi Hijau, Perubahan Sosial Ekonomi, Petani.*

A. PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan paling mendasar, di samping sandang dan papan bagi kehidupan manusia. Sebagai kebutuhan dasar, persoalan pangan menjadi perhatian utama bagi pemerintah di berbagai negara untuk menjaga ketersediaan pangan. Krisis pangan tidak hanya menimbulkan masalah ekonomi tetapi dapat menimbulkan masalah sosial politik di suatu negara (*Kompas*, 1985:4). Persoalan pangan khususnya beras telah menjadi permasalahan yang cukup penting bagi Indonesia dari masa ke masa. Pada masa penjajahan, pemerintah kolonial Belanda membuat program kebijakan pangan yang dikenal dengan nama *Olie Vlek*. *Olie Vlek* merupakan suatu kegiatan penyuluhan pertanian yang bertujuan menyebarluaskan tata cara bertani yang lebih baik kepada masyarakat petani di pedesaan. Saat itu, pemerintah kolonial Belanda menganggap bahwa kegiatan penyuluhan memiliki urgensi penting dan sebagai langkah awal dalam rangka

meningkatkan produksi pertanian kedepannya. Tercetusnya program swasembada baru terjadi pada saat Orde Lama berkuasa. Presiden Sukarno mengeluarkan kebijakan pangan yang dikenal dengan nama program kesejahteraan Kasimo pada tahun 1952. Selain itu, Orde Lama juga menerapkan program Padi Sentra. Program tersebut bertujuan untuk mencapai swasembada sebelum tahun 1963. Dalam pelaksanaannya, program ini mendapat banyak kendala dan akhirnya mengalami kegagalan (Mears & Moeljono, 1987:31-32) (Sajogya, 1974:9).

Pada masa awal Orde Baru, pemerintah dihadapkan banyak persoalan ekonomi yang sedang diguncang inflasi dan krisis dunia. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama pemerintah Orde Baru adalah krisis beras. Antara tahun 1966-1973, Indonesia telah mengalami krisis beras sebanyak lima kali (Hutabarat, 1974:3). Hal tersebut membuat pemerintah Orde Baru sadar akan pentingnya ketersediaan bahan pangan, khususnya beras.

Selama Orde Baru, industri dan pertanian merupakan dua sektor yang menjadi prioritas untuk mendukung pembangunan pertanian (Mubyarto, 1989:13). Pemerintah Orde Baru meletakkan pembangunan pertanian sebagai fokus utama untuk meningkatkan pendapatan petani. Penghasilan petani yang meningkat akan berdampak pada perbaikan taraf kehidupannya (Rahardjo, 1986:65). Kesadaran tersebut mendorong pemerintah Orde Baru melaksanakan modernisasi atau intensifikasi pertanian yang dikenal dengan sebutan "Revolusi Hijau".

Penerapan revolusi hijau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Panca Usaha Tani, yakni penggunaan bibit unggul, pupuk, insektisida, irigasi dan teknik menanam yang lebih baik. Panca usaha tani disampaikan kepada para petani tradisional melalui program Bimbingan Massal (Bimas) dan Intensifikasi Massal (Inmas) dengan dukungan utama para penyuluh pertanian lapangan (PPL). Dalam mendukung pelaksanaan panca usaha tani, pemerintah juga melancarkan program berskala besar untuk membina prasarana pengairan (Raharjo, 1986:67). Kemudian untuk mengembangkan perekonomian pedesaan, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973 tentang pembentukan Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD). Kegiatan BUUD/KUD meliputi: permodalan dengan sistem pemberian kredit, pengolahan hasil-hasil produksi dengan pengadaan sarana yang diperlukan serta penyuluhannya, dan pemasaran hasil-hasil produksi (Moertopo, 1975:51). Swasembada beras pada tahun 1984 merupakan sebuah kemajuan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Produksi beras pada tahun 1984 meningkat menjadi 25,5 juta ton (*Kompas*, 1984:1). Dalam kurun waktu lima tahun, produksi beras nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 1981 sebesar 22,3 juta ton dan tahun 1986 mencapai kurang lebih 26,6 juta ton (Departemen Pertanian, 1987:6). Atas keberhasilan swasembada beras yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, presiden Soeharto meraih penghargaan serta kehormatan untuk berpidato pada Hari Ulang

Tahun ke-40 *Food and Agricultural Organization* (FAO) di Roma (*Jawa Pos*, 1985:1).

Peningkatan produksi sebagai akibat dari program modernisasi pertanian menandai suksesnya revolusi hijau di negara-negara berkembang (Rahardjo, 1986:35). Namun, seberapa besar kenaikan produksi tersebut berpengaruh terhadap kondisi kehidupan para petani di pedesaan (Scott, 1981:16). Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian di salah satu wilayah yang masuk dalam Daerah Tingkat (Dati) II di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Karanganyar. Penulis melihat adanya kondisi dari berbagai literatur yang membahas tentang pengaruh revolusi hijau selama ini cenderung klatensentris, khususnya di wilayah Jawa Tengah (lihat Utami & Ihalaw, 1973; Booth, 1974; Schweizer, 1989). Kabupaten Klaten yang mayoritas merupakan daerah dataran rendah dan memiliki kondisi pertanian bersifat monokultur yakni padi khususnya di Kecamatan Delanggu, sehingga cukup dikenal sebagai daerah sentra produksi padi nasional. Sementara itu, Kabupaten Karanganyar memiliki keadaan yang berbeda. Kondisi pertanian daerah Kabupaten Karanganyar bersifat multikultur. Dengan kondisi daerah pertanian yang multikultur tersebut, bagaimana Kabupaten Karanganyar mampu menjaga kondisi jumlah produksi beras berada di atas angka konsumsi beras minimum, sehingga Kabupaten Karanganyar tetap mengalami surplus dalam pemenuhan kebutuhan beras? Kondisi tersebut cukup menarik melihat dari beberapa daerah lain banyak yang mengalami penurunan produksi akibat proses industrialisasi mulai merambah ke wilayah pedesaan pada tahun 1990-an. Selain itu, bagaimana pengaruh pelaksanaan revolusi hijau terhadap para petani pedesaan Kabupaten Karanganyar? dan apakah para petani pedesaan tersebut kondisinya telah sepenuhnya berubah dari sebelumnya petani subsisten menjadi petani rasional? Sebab, berdasarkan catatan statistik tahun 1975, masyarakat pedesaan Kabupaten Karanganyar mayoritas bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani mencapai 61,3 persen (Bappeda & Kantor Statistik Karanganyar, 1975:27). Berdasarkan

permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang pengaruh yang ditimbulkan adanya kebijakan revolusi hijau terhadap perubahan sosial ekonomi petani pedesaan di Kabupaten Karanganyar tahun 1969-1998.

B. METODE PENELITIAN

Rekonstruksi peristiwa sejarah sosial ekonomi ini menggunakan metode sejarah yakni melalui tahapan heuristik (pengumpulan sumber-sumber penulisan yang relevan, baik sumber primer maupun sumber sekunder), kritik sumber (analisis kritik terhadap sumber sejarah, baik yang berkaitan dengan keaslian sumber dan kebenaran sumber), interpretasi (menguraikan dan menyatukan hasil analisis kritik dari berbagai sumber yang terkumpul sehingga membentuk hasil interpretasi), dan historiografi (penyusunan fakta sejarah ke dalam bentuk tulisan sejarah) (Gottschalk, 1985:32) (Kuntowijoyo, 2013:73-77).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber primer pokok berupa laporan-laporan mantri tani dan beberapa lembaga yang terhimpun di kantor statistik daerah yakni arsip data statistik mengenai luas tanah pertanian, luas panen dan produksi tanaman padi sawah, petani dan buruh tani serta jangkauannya terhadap hak-hak atas kepemilikan tanah, bimbingan massal intensifikasi pertanian padi, penggunaan alat-alat pertanian modern, dan beberapa data statistik lainnya. Penulis juga menggunakan data lisan dengan melakukan wawancara terhadap informan sezaman sebagai data pendukung. Adanya temuan berita di beberapa surat kabar dan majalah diantaranya surat kabar *Kompas*, *Suara Bengawan*, *Majalah Carya Dharma Praja Mukti*, *Gema Pancasila* dan *Buletin Penerangan* sangat membantu penulis dalam mendukung penulisan peristiwa sejarah tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar sampai dengan Tahun 1973

Kabupaten Karanganyar merupakan Daerah Tingkat II di Provinsi Jawa Tengah. Letak Kabupaten Karanganyar berbatasan

dengan beberapa daerah diantaranya: sebelah Utara Kabupaten Sragen, sebelah Timur Provinsi Jawa Timur, sebelah Selatan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, sebelah Barat Kotamadya Surakarta dan Kabupaten Boyolali. Wilayah Kabupaten Karanganyar terdiri atas empat eks-kawedanan yakni: eks-kawedanan Karanganyar, Karangpandan, Jumapolo, dan Wonoharjo. Masing-masing eks-kawedanan masih dibagi menjadi beberapa kecamatan dan desa. Pada tahun 1968, wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Karanganyar dibagi menjadi 4 eks-kawedanan, 17 kecamatan, dan 177 desa. Kabupaten Karanganyar memiliki wilayah *enclave* yakni Kecamatan Colomadu (*Peraturan Daerah No. 6, 1968:7*).

Tabel 1. Luas Tanah Pertanian di Dati II Kabupaten Karanganyar Tahun 1973

No.	Jenis dan Penggunaan Tanah	Luas Tanah
1	Tanah sawah	25.865,888
	a. Irigasi	22.651,565
	b. Tadah hujan	3.184,243
	c. Lain-lain	30,079
2	Tanah kering	37.197,216
	a. Tanah pekarangan	15.531,618
	b. Tanah tegalan	20.976,420
	c. Padang rumput	678,772
	d. Tambak	10,406
3	Tanah lain-lain	15.279,206
	a. Hutan negara	9.738,665
	b. Perkebunan	3.001,080
	c. Lain-lain	2.539,461
Jumlah		80.618,340

Sumber: Bappeda & Kantor Statistik Karanganyar Tahun 1973, hlm. 48

Kabupaten Karanganyar merupakan daerah beriklim tropis dengan letak astronomis antara 110° 40'- 110° 70' BT dan 7° 28'- 7° 46' LS. Daerah Kabupaten Karanganyar termasuk kedalam kategori dataran rendah dengan rata-rata ketinggian wilayahnya 511 meter di atas permukaan laut (Bappeda & Kantor Statistik Karanganyar, 1973:9). Kabupaten Karanganyar memiliki luas 806,18 Km² dengan luas lahan pertanian tanah sawah mencapai 25.865,888 hektar. Berdasarkan data tabel 1, sebagian besar tanah sawah di Kabupaten Karanganyar telah memiliki jaringan irigasi. Wilayah

Kabupaten Karanganyar bagian Barat sebagian besar merupakan areal persawahan yang cocok untuk kegiatan pertanian tanaman pangan khususnya padi. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Jaten, Kebakkramat, Gondangrejo, Colomadu, Tasikmadu, Karanganyar, Mojogedang, dan Matesih (Bappeda & Kantor Statistik Karanganyar, 1973:48). Dengan demikian, wilayah Kabupaten Karanganyar tergolong sebagai salah satu daerah pertanian yang subur (*Peraturan Daerah* No. 6, 1968:7).

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Karanganyar terus mengalami peningkatan dalam kurun 1963-1973. Wilayah yang memiliki jumlah penduduk tinggi sebagian besar berada di daerah dataran rendah seperti Kecamatan Karanganyar, Colomadu, Tasikmadu, Jaten, Matesih, dan Kebakkramat (Bappeda & Kantor Statistik Karanganyar, 1973:16). Terkonsentrasinya penduduk Kabupaten Karanganyar di wilayah dataran rendah tidak lepas dari faktor kedekatan sumber pangan yakni ketersediaan lahan pertanian. Lahan pertanian di wilayah dataran rendah umumnya disebut "sawah" mempunyai kondisi tanah yang subur, sehingga daerah ini banyak dimaksimalkan oleh masyarakat petani Kabupaten Karanganyar untuk bercocok tanam pertanian padi.

Latar Belakang Lahirnya Kebijakan Revolusi Hijau

Lahirnya kebijakan revolusi hijau tidak lepas dari adanya bencana krisis beras menjelang berakhirnya masa Orde Lama. Pemerintah Orde Baru melakukan import beras dari Thailand dan Myanmar masing-masing sebesar 20.000 ton untuk menanggulangi krisis beras pada awal tahun 1966. Permasalahan krisis beras tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah, mengingat kebutuhan konsumsi beras semakin meningkat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Orde Baru menetapkan kebijakan peningkatan produksi beras melalui Revolusi Hijau (*green revolution*) (Arifin, 1994:2). Pada tahun 1968, pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi baru dalam bidang pertanian salah satunya dengan mendatangkan jenis padi Peta Baru (PB) 5 dan 8 dari *International Rice Research Institute*

(IRRI) di Los Banos, Filipina (Departemen Pertanian, 1978:99).

Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Pertambahan Penduduk Tiap Tahun di Kabupaten Karanganyar Tahun 1963-1973

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertambahan Penduduk Tiap Tahun (orang)	Pertambahan Penduduk Tiap Tahun (%)
1963	440.760	12.811	2,99
1964	447.425	6.665	1,51
1965	454.589	7.164	1,60
1966	463.282	8.693	1,91
1967	470.172	6.890	1,49
1968	481.981	11.809	2,51
1969	494.439	12.458	2,58
1970	497.195	2.756	0,56
1971	504.377	7.182	1,44
1972	514.689	10.312	2,04
1973	522.609	7.920	1,54

Sumber: Bappeda & Kantor Statistik Karanganyar Tahun 1973, hlm. 16

Banyaknya daerah di Jawa yang memiliki kondisi tanah pertanian subur, mendorong pemerintah menempatkan Jawa sebagai daerah prioritas utama dalam mendukung pelaksanaan Revolusi Hijau. Salah satu daerah tersebut adalah Dati II Kabupaten Karanganyar. Adanya kendala dalam peningkatan produksi padi menjadi persoalan penting bagi pemerintah Dati II Kabupaten Karanganyar. Kendala tersebut di antaranya disebabkan oleh serangan hama dan musim kemarau yang panjang. Pada permulaan awal tahun 1971, serangan hama tikus melanda enam kecamatan di Kabupaten Karanganyar yakni Kecamatan Karanganyar, Matesih, Mojogedang, Karangpandan, Kerjo, dan Jumantono. Serangan hama tersebut menyebabkan areal tanaman padi seluas 480 hektar mengalami kerusakan rata-rata antara 15 persen sampai 25 persen. Akibat serangan hama tersebut, menyebabkan berkurangnya hasil panen yang didapat oleh para petani. Dalam menanggulangi kala adanya hama tikus merajalela, terdapat sebagian petani Kabupaten Karanganyar yang mengganti tanaman padinya dengan tanaman *rami* (serat) (*Kompas*, 1971:5).

Kedaaan musim kemarau yang panjang pada tahun 1972 menyebabkan terjadinya krisis

beras nasional. Keadaan tersebut turut berpengaruh dalam hasil produksi usaha tani tanaman padi di Kabupaten Karanganyar. Hasil produksi padi di Kabupaten Karanganyar pada tahun 1972 hanya mencapai 1.041,504 kwintal dengan luas panen 28.713 hektar. Harga padi kering di Kabupaten Karanganyar mencapai 4.500 per-kwintal, sedangkan harga beras jenis Bengawan berada di kisaran 90 per-kilogram. Dibandingkan dengan 9 macam bahan pokok lain, harga beras masih di bawah harga minyak goreng (105 per-liter), gula pasir (110 per-kg), dan ikan asin (125 per-kg). Harga beras tersebut masih tergolong cukup tinggi, mengingat beras merupakan kebutuhan pangan utama bagi masyarakat (Bappeda & Kantor Statistik Karanganyar, 1973:77-78).

Berdasarkan data dalam tabel 2 di atas menunjukkan bahwa rata-rata pertambahan penduduk Kabupaten Karanganyar mencapai 1,83 persen per-tahun. Bertambahnya jumlah penduduk tersebut secara langsung berpengaruh terhadap konsumsi kebutuhan pangan pokok khususnya beras di Kabupaten Karanganyar. Selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, penerapan revolusi hijau di Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu upaya penting pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan beras yang cukup dan mampu mencapai swasembada beras.

Pelaksanaan Kebijakan Revolusi Hijau di Kabupaten Karanganyar Tahun 1969-1998

Revolusi hijau (*green revolution*) merupakan kebijakan pemerintah Orde Baru dalam bidang pertanian yang mulai dikenal masyarakat petani di Kabupaten Karanganyar sejak akhir 1960-an (Wawancara dengan Hadi Paiman, 29 Juli 2019). Penerapan kebijakan revolusi hijau ditandai dengan adanya Bimas Gotong Royong (Instruksi Presiden No. 11 Tahun 1969) dan pengaturan tentang organisasi dan tata kerja Bimbingan Massal (Keputusan Presiden No. 95 Tahun 1969) (*Carya Dharma Praja Mukti*, 1969:50-51). Revolusi hijau juga dikenal dengan sebutan lain yaitu revolusi pupuk (*fertilizer revolution*), revolusi benih baru (*new seed revolution*) (Sajogya, 1974:13), ataupun revolusi teknologi (*technological revolution*) (Tjondronegoro, 1984:4). Revolusi

hijau merupakan suatu program intensifikasi pertanian tanaman pangan khususnya padi. Program ini memiliki tujuan untuk mengenalkan dan meluaskan penggunaan teknologi baru dalam usaha tani serta meningkatkan produksi beras. Revolusi hijau berbeda dengan *land reform* yang berusaha mengubah tatanan bangunan sosial pedesaan melalui pemerataan penguasaan tanah (Fauzi, 1999:164). Dengan demikian, revolusi hijau tidak dapat dikatakan sebagai pengganti reforma agrarian (Rahardjo, 1984:8).

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tentang Otonomi Daerah pada tahun 1974, pemerintah daerah tingkat II Kabupaten Karanganyar dapat melaksanakan pembangunan daerah sesuai PELITADA (Pembangunan Lima Tahun Daerah) Dati I Jawa Tengah dan PELITA (Pembangunan Lima Tahun) Nasional. Sejak masa pemerintahan Bupati Waloeya Cokrodarmanto (1970-1982), sektor pertanian telah menjadi prioritas utama dalam pembangunan wilayah Dati I Kabupaten Karanganyar. Pembangunan tersebut terus berlanjut sampai masa kepemimpinan Bupati Hartono (1982-1987) (*Gema Pancasila* Nomor 9, 1982:3). Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan pembangunan di sektor pertanian khususnya peningkatan produksi pangan, pemerintah Kabupaten Karanganyar menerapkan program-program revolusi hijau. Penerapan program-program revolusi hijau tersebut antara lain:

Bimbingan Masal (Bimas)

Bimas (*mass guidance*) merupakan suatu sistem terpadu dari kegiatan penyuluhan pertanian disertai dengan adanya penyediaan berbagai sarana produksi dan kredit yang bertujuan untuk meningkatkan produksi melalui intensifikasi tanaman padi (*Keputusan Presiden* Nomor 62, 1983:2). Pelaksanaan program Bimas merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1969 yang menetapkan keorganisasian Bimas dengan dibentuknya Badan Pengendali Bimas di tingkat pusat, Badan Pembina Bimas di tingkat provinsi (Dati I), dan Badan Pelaksana Bimas di tingkat kabupaten (Dati II). Masing-masing badan tersebut dipimpin oleh Menteri Pertanian,

Gubernur (Kepala Dati I), dan Bupati (Kepala Dati II). Badan Pelaksana Bimas tingkat kecamatan dan desa baru mulai dibentuk pada tahun 1971 dengan adanya SK Menteri Pertanian Nomor 248/Kpts/Org/6/1971 (Departemen Pertanian, 1978:68). Pelaksanaan Bimas di Dati II Kabupaten Karanganyar sudah dimulai pada akhir tahun 1969. Keberjalanan Bimas baru diterapkan di beberapa wilayah yang cocok untuk perkembangan tanaman padi sawah (areal persawahan luas) seperti Kecamatan Jaten, Kebakkramat, dan Tasikmadu. Sampai dengan tahun 1973, program Bimas belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh di Kabupaten Karanganyar, sebab masih terdapat 21 desa belum memperoleh kegiatan penyuluhan pertanian (Bappeda & Kantor Statistik Karanganyar, 1973:56). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan revolusi hijau khususnya melalui program Bimas dilakukan oleh pemerintah secara bertahap.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang usaha-usaha khusus dalam meningkatkan produksi pangan, presiden menginstruksikan kepada Kepala Dati I dan Kepala Dati II untuk melaksanakan dan mengamankan program-program peningkatan produksi padi di daerah-daerah. Program-program tersebut mencakup usaha perluasan areal penanaman padi, penggunaan Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW) dan pemberantasan hama (*Instruksi Presiden* Nomor 10, 1976:1). Berkaitan dengan hal tersebut, usaha-usaha intensifikasi padi (panca usaha tani) melalui Bimas terus ditingkatkan. Penerapan panca usaha tani meliputi penggunaan bibit unggul, pengelolaan tanah yang baik, pemupukan, irigasi, dan pemberantasan hama (Departemen Pertanian, 1978:60).

Sampai dengan tahun 1982, terdapat berbagai macam varietas padi unggul yang tersebar di Kabupaten Karanganyar. Varietas pertama yaitu Padi Unggul Nasional dari Lembaga Penelitian Padi di Bogor. Jenis Padi Unggul Nasional diantaranya varietas *Bengawan*, *Sigadis*, *Dara*, *Cisadane*, dan *Dewi Ratih*. Varietas kedua yaitu Padi Unggul Baru dari Lembaga Penelitian Padi Internasional di

Filiphina. Jenis Padi Unggul Baru meliputi varietas PB-5, PB-8, C-4, Pelita I, dan Pelita II, IR 36, IR 64. Varietas padi IR. 36 dan IR 64 termasuk Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW). Varietas ketiga yaitu Padi Unggul Lokal yang dihasilkan dari masing-masing daerah. Jenis Padi Unggul Lokal meliputi varietas padi *Gembira*, *Sinta*, dan *Bengawan* (*Gema Pancasila* Nomor 3, 1982:21). Dari berbagai macam varietas padi tersebut, jenis padi IR 36 dan IR 64 banyak diminati oleh masyarakat petani di Kabupaten Karanganyar (Wawancara dengan Sardjono, 11 September 2019). Sementara itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1969, penyaluran dan penyebaran pupuk di Dati II Kabupaten Karanganyar dilakukan oleh PN. Petani dengan mendapat pengawasan dari Kepala Dati I dan Kepala Bulog. Jenis pupuk yang didistribusikan ke para petani Kabupaten Karanganyar diantaranya pupuk Urea, pupuk TPS, pupuk ZA, pupuk KCL, dan pupuk KS (*Kalk Salpeter*). Selain pupuk, pendistribusian pestisida jenis insektisida diantaranya Furadhan 3 G, Diazinon 10 G, Mipcinon 6 G, Sevin 85 S, Trithion 4 EC, Dursban 20 EC, dan Hastation 40 EC (*Gema Pancasila* Nomor 15, 1983:11-12).

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 menggantikan *Algemeen Waterreglement* Tahun 1936 (*Staatsblad* Tahun 1936 Nomor 489) berpengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan irigasi di daerah-daerah. Ketetapan Undang-Undang tersebut diperkuat dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 yang lebih spesifik mengatur tentang irigasi. Berdasarkan ketetapan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Dati II Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur bangunan jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Karanganyar (*Peraturan Pemerintah* Nomor 23, 1982:18-19).

Sejak masa kepemimpinan Bupati Waloeja Cokrodarmanto, pemerintah Dati II Kabupaten Karanganyar memberi perhatian khusus dengan pembangunan jaringan irigasi baru dan perbaikan bangunan irigasi yang telah ada sebelumnya. Pada tahun 1973, pemerintah

Kabupaten Karanganyar melakukan rehabilitasi bangunan jaringan irigasi sebanyak 16 buah salah satunya yaitu megaprojek rehabilitasi waduk Lalung yang menghabiskan biaya sekitar 62.240.000 rupiah. Pada akhir tahun 1973, Kabupaten Karanganyar telah memiliki bangunan irigasi waduk berjumlah 6 buah dan bendungan berjumlah 19 buah yang tersebar di beberapa kecamatan (Bappeda & Kantor Statistik Karanganyar, 1973:89). Dengan direhabilitasi bangunan jaringan irigasi, berpengaruh pada terjadinya peningkatan intensitas masa tanam padi sawah. Salah satunya yakni adanya rehabilitasi bendungan Parakan di Kelurahan Balong Kecamatan Karanganyar. Rehabilitasi bendungan tersebut dapat mengairi areal tanah sawah seluas 164 hektar dan melakukan masa panen padi tiga kali setahun. Adanya bangunan jaringan irigasi tersebut, benar-benar bermanfaat bagi pengairan lahan sawah secara teratur dan mendukung pertumbuhan tanaman padi di Kabupaten Karanganyar (*Gema Karanganyar* Nomor 3, 1982:8).

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Koperasi Unit Desa (KUD)

Penyuluhan pertanian merupakan kegiatan pendayagunaan dan penghasilgunaan segala sumber daya pertanian berdasarkan prinsip kerjasama yang serasi, selaras dan terpadu antara masyarakat petani dengan pemerintah, pemerintah pusat dengan daerah. Sejak tahun 1970, penyuluh pertanian lapangan bertanggungjawab atas kegiatan penyuluhan ditingkat Wilud Dati II kabupaten (Departemen Pertanian, 1978:72). Pada tahun 1973, jumlah desa yang terdapat kegiatan penyuluhan berjumlah 145 desa dari 177 desa di Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian, masih terdapat beberapa desa di Dati II Kabupaten Karanganyar belum terjangkau kegiatan penyuluhan usaha tani (Bappeda & Kantor Statistik Karanganyar, 1973:56).

Pelaksanaan penyuluhan di Dati II Kabupaten Karanganyar dibagi menjadi 5 Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) dan 17 Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP). WKBPP merupakan kesatuan wilayah yang terdiri atas WKPP,

berfungsi sebagai pengaturan dan pelayanan semua aktivitas penyuluhan di wilayah kerja BPP. WKPP merupakan tempat petugas Penyuluh Pertanian Lapangan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan terhadap para petani dengan batas Wikel (Wilayah Kelompok) yang sudah ditentukan. Pembagian Wilayah Kerja BPP di Kabupaten Karanganyar, yaitu:

1. WKBPP Mojogedang, terdiri atas tiga WKPP diantaranya: Mojogedang, Jenawi, dan Kerjo.
2. WKBPP Kebakramat, terdiri atas empat WKPP diantaranya: Kebakramat, Jaten, Tasikmadu, dan Karanganyar.
3. WKBPP Karangpandan, terdiri atas empat WKPP diantaranya: Karangpandan, Matesih, Tawangmangu, dan Ngargoyoso.
4. WKBPP Jumapolo, terdiri atas empat WKPP diantaranya: Jumapolo, Jumantono, Jatiyoso, dan Jatipuro.
5. WKBPP Colomadu, terdiri atas dua WKPP diantaranya: Colomadu dan Gondangrejo (Wawancara dengan Paiman, 29 Juli 2019).

Pada tanggal 30 Oktober 1982, para kontak tani dan PPL dari Blora melakukan kegiatan karya wisata ke Desa Tunggul Rejo Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar. Kegiatan karya wisata tersebut bertujuan untuk menambah wawasan, menjalin persahabatan dan bertukar informasi antar kelompok tani mengenai perkembangan pertanian di daerah lain. Selain mendapat kunjungan dari daerah lain, Bimas Kabupaten Karanganyar juga menyelenggarakan kegiatan *temu wicara* kontak tani. *Temu wicara* kontak tani diadakan pada tanggal 20-23 Oktober 1982 bertempat di balai desa Karang Kecamatan Karangpandan. Kegiatan yang mengumpulkan wakil kontak tani dari berbagai daerah se-Jawa Tengah bertujuan untuk membicarakan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tani (*kadang tani*), tukar pengalaman (*tukar rembug*), dan mencari titik penyelesaian permasalahan terkait. Turut hadirnya Ir. Satrio Murdowo (Kepala Dinas Pertanian Karanganyar) dan Ir. Sulbiati (Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Tengah) dalam kegiatan tersebut, menggambarkan

adanya sinergisitas antara petugas dan para petani yang diwakili oleh kontak tani sebagai subjek dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan pertanian khususnya swasembada beras (*Gema Pancasila* Nomor 8, 1982:7-20).

Kelancaran petugas PPL di lapangan juga didukung dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana pertanian yang tersedia di Koperasi Unit Desa (KUD). Sejak tahun 1974, Dati II Kabupaten Karanganyar telah memiliki 2 BUUD dengan jumlah anggota sebanyak 1.360 orang dan 15 KUD dengan jumlah anggota 18.604 orang. Dengan demikian, setiap kecamatan di Dati II Kabupaten Karanganyar terdapat satu buah BUUD atau KUD (Bappeda & Kantor Statistik Karanganyar, 1974:46). Pada tahun 1977, seluruh BUUD telah beralih menjadi KUD dengan jumlah anggota mencapai 14.641 orang. Jumlah anggota KUD di Kabupaten Karanganyar terus meningkat, dari tahun 1978 berjumlah 19.832 orang dan tahun 1983 berjumlah 25.413 orang (Bappeda & Kantor Statistik Karanganyar, 1983:153).

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984, pembentukan KUD mengalami perubahan dengan dapat dibentuk oleh masyarakat desa sendiri dan beranggotakan masyarakat desa (dari suatu desa atau gabungan lebih dari satu desa yang saling berbatasan), baik yang menjadi anggota kelompok di pedesaan seperti: kelompok tani, kelompok P3A, kelompok keluarga berencana, dan sebagainya. Wilayah kerja KUD meliputi sekelompok desa yang saling berbatasan, luasnya dapat ditentukan oleh potensi ekonomi yang dimiliki dan mencakup daerah para anggota bertempat tinggal. Dengan demikian, dalam satu kecamatan dapat dibentuk lebih dari satu KUD. Sebelumnya, pembentukan KUD beserta wilayahnya ditetapkan oleh gubernur (selaku ketua Badan Pembina Bimas) atas rekomendasi dari bupati (selaku ketua Badan Pelaksana Bimas) (*Instruksi Presiden* Nomor 4, 1984:5).

Hambatan dalam Pelaksanaan Revolusi Hijau di Kabupaten Karanganyar

Berkaitan dengan berbagai program revolusi hijau di atas, terdapat beberapa

hambatan yang terjadi selama pelaksanaan revolusi hijau di Dati II Kabupaten Karanganyar. Hambatan-hambatan tersebut di antaranya yakni penyusutan lahan pertanian, rendahnya taraf pendidikan petani, kerusakan infrastruktur bangunan di sektor irigasi, perubahan tata ruang daerah, dan terakhir adanya permasalahan dalam kredit Bimas. Salah satu yang menarik penulis adalah permasalahan tentang penyelewengan dan tunggakan kredit Bimas. Kredit Bimbingan Massal yang telah dimulai sejak tahun 1969 sebagai pinjaman modal (kredit) bagi para petani terutama petani kecil untuk mengembangkan usaha taninya, ternyata penerapan dilapangan cukup memprihatinkan. Sebagian besar permasalahan tunggakan Bimas disebabkan oleh adanya kegagalan hasil produksi usaha tani dan penyalahgunaan penerima kredit Bimas (Mears & Moeljono, 1987:49). Kondisi kredit Bimas di Kabupaten Karanganyar banyak diselewengkan oleh para Pamong Desa, yang notabennya mereka adalah para petani besar (tergolong mampu). Keadaan diperparah dengan adanya tunggakan-tunggakan yang diakibatkan oleh pamong desa tidak mampu mengembalikan pinjaman kredit Bimas. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Karanganyar Soekusno, yakni:

"Tunggakan kredit Bimbingan Massal tahun 1982 ing Kabupaten Karanganyar kari 25 persen. Sabanjure isih ono Pamong desa cacah papat kang diskores, jalaran isih nunggak kredite. Pamong Desa mau bakal dicabut skorese menawa wis bisa nglunasi tunggakane. Saliyane kuwi ana sawenehing Pamong Desa kang mapan ing Kecamatan Ngargoyoso bakal diajokake ing pengadilan jalaran wis ora saguh mbayar utange. Dene kecamatan kang wis lunas babar pisan yakuwi: Kecamatan Tasikmadu, Jaten, Colomadu, lan Kebakkramat" (*Gema Pancasila* Nomor 4, 1982:16).

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa para petani kecil (subsisten) di Kabupaten Karanganyar kebanyakan menghindari, enggan ambil bagian dalam pinjaman kredit Bimas. Hal tersebut dikarenakan menurunnya tingkat keuntungan yang diharapkan dari penggunaan kredit dalam paket Bimas. Kendati pemerintah

telah menetapkan harga maksimum pupuk dan harga minimum gabah, para petani sendiri seringkali menerima keuntungan bersih lebih rendah. Para petani harus mengeluarkan biaya tambahan pengangkutan pupuk sampai ke ladang dan gabah dari ladang sampai ke kantor KUD atau rumah. Demikian juga apabila hasil produksi padi ternyata lebih buruk dari yang diharapkan, keuntungan yang didapatkan oleh petani akan semakin berkurang (Wawancara dengan Sartono, 28 Juli 2019). Kenyataan tersebut juga menunjukkan bahwa pinjaman biaya kredit Bimas masih cukup tinggi, sehingga sulit dijangkau oleh para petani kecil (subsisten). Dengan demikian, pinjaman kredit Bimas lebih banyak digunakan oleh kalangan petani menengah ke atas walau masih terdapat kesulitan-kesulitan yang dihadapi (Wawancara dengan Sardjono, 11 September 2019).

Dampak Revolusi Hijau terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Petani di Kabupaten Karanganyar Tahun 1969-1998

Penerapan berbagai program revolusi hijau tahun 1969-1998 dalam bidang pertanian telah membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial ekonomi petani pedesaan di Kabupaten Karanganyar. Program-program revolusi hijau identik dengan penggunaan teknologi baru seperti yang terlihat dalam penerapan program intensifikasi pertanian. Penggunaan teknologi baru tersebut berpengaruh besar dalam perubahan tata cara penanaman pertanian padi, sehingga tidak sedikit orang menyebutnya sebagai bagian dari revolusi agronomis (Raharjo, 1984:8). Dengan demikian, kondisi tersebut sejalan dengan pernyataan Margono Slamet (Taneko, 1990:155) bahwa perubahan yang diakibatkan oleh adanya revolusi hijau termasuk dalam perubahan proses. Hal tersebut disebabkan perubahan proses hanya mendaur ulang dari perubahan dasar yang sebelumnya pernah terjadi. Dengan ditunjang melalui adanya program-program intensifikasi, penyuluhan-penyuluhan dan penyediaan kredit usaha tani, revolusi hijau mendorong perubahan wajah pertanian pedesaan Kabupaten Karanganyar kearah modernisasi.

Tabel 3. Pemenuhan Kebutuhan Beras di Dati II Kabupaten Karanganyar

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Produksi Beras (Ton)	Konsumsi Fisik Beras Minimum Per-Tahun (Ton)	Ketersediaan Beras (Ton)	Ket.
1984	653.633	147.820,4	0,106	0,226	Surplus
1987	683.599	131.159,6	0,116	0,191	Surplus
1990	708.289	147.200,3	0,118	0,207	Surplus
1993	733.573	151.811,4	0,115	0,206	Surplus
1996	760.618	149.667,7	0,111	0,196	Surplus

Sumber: Diolah dari Bappeda & Kantor Statistik Karanganyar Tahun 1984-1996

Dati II Kabupaten Karanganyar berhasil swasembada beras dengan surplus beras mencapai 0,12 ton pada tahun 1984. Atas keberhasilan tersebut, pemerintah Dati II Kabupaten Karanganyar memperoleh penghargaan (*dhuaja*) terbaik kedua dalam usaha meningkatkan produksi dan pengadaan pangan khususnya produksi pertanian padi di Jawa Tengah (*Suara Bengawan*, 1986:5). Berdasarkan data dalam tabel 3, Kabupaten Karanganyar memiliki ketersediaan beras berada di atas angka konsumsi beras minimum, sehingga Kabupaten Karanganyar mengalami surplus dalam pemenuhan kebutuhan beras. Semenjak keberhasilan swasembada beras pada tahun 1984 jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar terus meningkat, walaupun angka pertumbuhan berhasil ditekan dengan adanya program Keluarga Berencana (KB). Sejak 1984-1998, jumlah rata-rata angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Karanganyar mencapai 1,18 persen per-tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kehadiran revolusi hijau memberikan alternatif penting dalam menjaga keseimbangan pangan khususnya kebutuhan beras di Kabupaten Karanganyar.

Adanya saluran komunikasi pedesaan melalui program Koran Untuk Desa (KUD) dan Koran Masuk Desa (KMD) juga memberi sumbangan dalam kelancaran pembangunan pertanian di Kabupaten Karanganyar. Program Koran Untuk Desa meliputi penyebaran koran

yang berasal dari koran harian *Suara Karya*, koran harian *Angkatan Bersenjata*, dan koran harian *Berita Yudha*. Program tersebut bertujuan untuk menumbuhkan minat baca dari masyarakat pedesaan dan menjadi media penyebaran informasi dari program-program pembangunan. Terdapat juga program Koran Masuk Desa yang menggunakan tiga surat kabar yakni “*Desaku Membangun*” dari Koran *Kartika*, “*Dharma Kand*” Sala, dan “*Pari Kesit*” Sala. Pada tahun 1981, program Koran Untuk Desa dan Koran Masuk Desa dapat tersebar di 147 desa dari 177 desa di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar. Selain penyebaran koran program KUD dan KMD, disebarakan juga majalah Gema Pancasila dan Gema Karanganyar di seluruh desa di Kabupaten Karanganyar (*Gema Pancasila* Nomor 17, 1981:9-10).

Perubahan Sosial Masyarakat Petani Kabupaten Karanganyar

Penerapan program-program revolusi hijau berpengaruh terhadap terjadinya perubahan sosial masyarakat petani pedesaan di Kabupaten Karanganyar. Perubahan-perubahan sosial tersebut antara lain *pertama*, perubahan hubungan *patron-klien* dalam masyarakat petani. Sebelum adanya revolusi hijau, petani besar merupakan salah satu *patron* “bapak angkat” bagi petani kecil dan buruh tani di daerah pedesaan. Dalam pandangan buruh tani (*klien*), petani besar tidak hanya sebagai penyedia lapangan kerja tetapi juga sebagai bapak (*patron*) yang dapat melindungi dan mengayomi dalam kehidupan sosial sehari-harinya. Perlindungan tersebut berupa jaminan penghidupan subsistensi dasar dan terhindar krisis subsistensi (Scott, 1993:9). Berdasarkan tabel 4 tentang jangkauan petani terhadap hak-hak atas tanah, jumlah petani kecil di Kabupaten Karanganyar lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah petani besar. Hal tersebut ditunjukkan dalam tabel 4. bahwa masyarakat pedesaan Kabupaten Karanganyar yang bekerja sebagai petani kecil pada tahun 1975 mencapai 73.957 jiwa dan petani besar hanya berjumlah 48.185 jiwa. Pada akhir tahun 1998, jumlah petani kecil (buruh tani) meningkat mencapai 96.182 jiwa dan petani besar berjumlah 93.951 jiwa. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa jumlah *klien* lebih besar dari *patron* serta pentingnya pemberdayaan *klien* dalam keberlangsungan proses pembangunan pertanian di Kabupaten Karanganyar.

Tabel 4. Jumlah Petani Menurut Jangkauannya Terhadap Hak Atas Tanah di Kabupaten Karanganyar Tahun 1975

No.	Petani	Jumlah
1	Petani Kenceng	48.185
2	Petani ½ Kenceng	41.632
3	Petani Ngindung	15.883
4	Petani Magersari	12.020
5	Petani Gundul	1.422

Sumber: Bappeda & Kantor Statistik Karanganyar Tahun 1975, hlm. 29

Banyaknya masyarakat pedesaan Kabupaten Karanganyar yang bekerja sebagai petani kecil, tak terkecuali buruh tani tidak diringi dengan perluasan lapangan kerja di sektor pertanian. Hal tersebut terlihat pada jumlah luas tanah sawah pada akhir Pelita III mengalami penyusutan menjadi 24.089,2 hektar dari jumlah sebelumnya mencapai 25.865,8 hektar (Diolah dari data Bappeda & Kantor Statistik Karanganyar Tahun 1983). Modernisasi pertanian melalui revolusi hijau telah menghilangkan hubungan *patron-klien* yang dahulunya berjalan secara harmonis. Dalam perkembangannya, penerapan program-program revolusi hijau lebih banyak memberikan manfaat terhadap para petani besar di Kabupaten Karanganyar salah satunya yakni adanya penyalahgunaan kredit Bimas. Para petani besar merasa tidak tergantung lagi pada para petani kecil dan buruh tani dalam mengelola usaha tani. Para petani besar memiliki keterikatan untuk memulihkan modal yang dikeluarkan atas berbagai penggunaan teknologi baru. Dengan hilangnya keberadaan petani besar sebagai *patron*, revolusi hijau menampilkan sosok pemerintah (pusat) seolah-olah sebagai *patron* tunggal baru bagi masyarakat petani kecil dan buruh tani

pedesaan di Kabupaten Karanganyar. Kondisi tersebut tidaklah mengherankan dengan munculnya pemerintah sebagai *patron* tunggal dikarenakan pemerintah memiliki wewenang dan kecukupan sumber dana dalam menyediakan pelayanan terkait usaha tani terhadap masyarakat petani di pedesaan (Wawancara dengan Sardjono, 11 September 2019).

Dengan hilangnya *patron-klien*, hubungan yang terjalin dalam *patron* baru dan *klien* tersebut menjadi bersifat lebih formal dan ekonomi. Hal tersebut terjawab dengan dibentuknya lembaga KUD oleh pemerintah yang bertugas untuk melayani dan melindungi (sebagai *patron*) para petani kecil dan buruh tani pedesaan di Kabupaten Karanganyar. Dibentuknya KUD sebagai *patron* baru bagi masyarakat petani kecil pedesaan oleh pemerintah, masih dipertanyakan fungsinya mengingat keberpihakan KUD lebih cenderung mengarah pada mencari keuntungan ekonomis. Di sisi lain, petani besar membentuk hubungan baru dengan para *klien* (petani kecil dan buruh tani) melalui adanya sistem *tebasan* (Wawancara dengan Sartono, 28 Juli 2019).

Masyarakat miskin di Kabupaten Karanganyar pada tahun 1984 berjumlah 46.614 jiwa dan masyarakat sangat miskin berjumlah 12.718 jiwa (Bappeda & Kantor Statistik Karanganyar, 1985:97). Dengan demikian, terdapat sebagian masyarakat petani pedesaan Kabupaten Karanganyar secara sosial ekonomi hidup di bawah garis kemiskinan. Keberadaan petani besar yang beralih menggunakan teknologi modern menyebabkan berkurangnya ketergantungan mereka terhadap para buruh tani. Dengan semakin berkurangnya penggunaan tenaga kerja buruh tani di sektor pertanian, menyebabkan sebagian buruh tani mencari penghidupan lain seperti menjadi buruh di sektor industri dan sebagian yang lain tetap bertahan sebagai buruh tani dalam bentuk sistem baru yaitu sistem *tebasan* (Wawancara dengan Sartono, 28 Juli 2019).

Kedua, munculnya sistem panen *tebasan*. Pada akhir tahun 1983, sistem panen melalui *tebasan* sudah berkembang di Kabupaten Karanganyar. Sistem *tebasan*

(*contracting-nut*) merupakan transaksi atau cara pembelian hasil bumi termasuk padi secara langsung di sawah-sawah petani oleh para penebas, saat menjelang tanaman padi siap untuk dipanen. Dalam pelaksanaan *tebasan*, penebas dan petani yang bersangkutan harus lapor kepada kepala desa (*lurah*) setempat. Proses mendapatkan ijin *tebasan* dikenakan biaya sebesar lima per mil dari harga, serendah-rendahnya 750 rupiah yang berlaku hanya satu kali *tebasan* (*Peraturan Daerah* Nomor 19, 1983:2).

Pada masa sebelum adanya sistem *tebasan* di Kabupaten Karanganyar, para petani pedesaan banyak menggunakan sistem panen tradisional melalui *ani-ani*. Sistem panen tradisional memberi ruang bagi penduduk pedesaan (terutama mereka yang miskin) atau buruh tani untuk ikut serta melakukan panen dengan imbalan memperoleh upah *bawonan* atau upah panen rata-rata sebesar dua ikat (*unting*) dalam sehari. Modernisasi pertanian melalui berbagai program revolusi hijau berpengaruh terhadap munculnya sistem panen *tebasan*. Adanya sistem panen *tebasan* di Kabupaten Karanganyar selaras dengan pernyataan Booth dan McCawley (1987:13), bahwa berkembangnya sistem *tebasan* dipengaruhi oleh perubahan teknologi dari penggunaan *ani-ani* ke penggunaan sabit yang umumnya digunakan oleh tenaga-tenaga borongan. Di sisi lain, berkembangnya sistem panen *tebasan* juga berkaitan erat dengan kondisi semakin mudarnya hubungan *patron-klien* di daerah pedesaan (Wawancara dengan Sardjono, 11 September 2019).

Sebagian besar para petani yang menggunakan sistem *tebasan* ini adalah petani besar dan menengah dengan luas kepemilikan lahan di atas 0,5 hektar. Para petani besar dan menengah lebih memilih menggunakan sistem *tebasan* disebabkan oleh adanya ketidakmenentuan setoran beras yang diterima oleh KUD dan penghematan usaha tani dengan tidak mengeluarkan biaya masa panen. Di sisi lain, para petani kecil umumnya lebih mengusahakan untuk memanen hasil produksi padinya sendiri melalui sistem tradisional. Penggunaan sistem tersebut tidak lepas dari kebutuhan hidup petani kecil yang banyak

bergantung pada hasil produksi pertanian padi. Sebagian dari hasil panen padi dapat mereka jual untuk mencukupi berbagai keperluan hidup, sedangkan sisanya disimpan di *grobog* sebagai cadangan pangan dalam mencukupi kebutuhan mereka sampai menjelang masa panen selanjutnya (Wawancara dengan Hadi Paiman, 29 Juli 2019).

Keadaan yang cukup memprihatinkan adalah yang dialami oleh buruh tani. Dengan adanya sistem tebasan, maka peranan buruh tani semakin tergeser dan menurun penggunaan jasa tenaga kerjanya. Terdapat sebagian buruh tani yang mulai beralih menjadi buruh industri seiring dengan proyek-proyek industri yang berkembang di sejumlah daerah Kabupaten Karanganyar (Wawancara dengan Sardjono, 11 September 2019). Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang cukup serius mengingat jumlah buruh tani di Kabupaten Karanganyar masih cukup besar dan jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan petani sendiri.

Perubahan Ekonomi Masyarakat Petani Kabupaten Karanganyar

Penerapan berbagai program revolusi hijau juga menimbulkan perubahan ekonomi masyarakat petani di Kabupaten Karanganyar. Perubahan-perubahan ekonomi tersebut antara lain *Pertama*, perubahan pertanian tradisional ke pertanian modern (penggunaan teknologi baru). Pada masa pemerintahan Orde Baru, munculnya kebijakan revolusi hijau telah menimbulkan banyak perubahan-perubahan ekonomi dalam kehidupan petani pedesaan. Salah satu perubahan ekonomi penting yang terjadi di pedesaan adalah adanya modernisasi pertanian melalui penerapan teknologi baru khususnya dalam tata cara pertanian padi (Booth & McCawley, 1987:9). Para petani di Kabupaten Karanganyar mulai banyak beralih menggunakan teknologi baru dalam usaha taninya. Meningkatnya penggunaan teknologi tersebut, berkembang seiring semakin intensifnya penyebaran program panca usaha tani melalui Bimas dan PPL (Wawancara dengan Suharno, 11 September 2019).

Sebelum adanya revolusi hijau, pengelolaan tanah pertanian di Kabupaten Karanganyar masih banyak menggunakan

tenaga kerja perempuan (pertanian tradisional) baik pada saat *menandur*, *mematun*, dan *memanen*. Selain itu, pengolahan tanah sawah masih menggunakan bajak tradisional yang ditarik oleh sapi atau kerbau. Penggunaan alat bajak tradisional tersebut dapat dilihat keberadaanya melalui tingginya angka kepemilikan hewan ternak sapi dan kerbau oleh masyarakat pedesaan di Kabupaten Karanganyar. Munculnya revolusi hijau mendorong terjadinya perubahan-perubahan dalam tata cara bertani sebelumnya yakni dengan adanya penggunaan teknologi baru (modern) oleh petani di Kabupaten Karanganyar yang mencakup teknologi pra panen maupun teknologi pasca panen (Wawancara dengan Suharno, 11 September 2019). Pengelolaan tanah pertanian yang sebelumnya masih menggunakan sistem tradisional atau konvensional, kemudian mulai beralih menggunakan teknologi modern. Berbagai teknologi baru tersebut dapat dilihat dalam tabel 5, mengenai perkembangan penggunaan alat-alat pertanian modern di Kabupaten Karanganyar pada tahun 1984-1988.

Tabel 5. Penggunaan Alat-Alat Pertanian di Dati II Kabupaten Karanganyar Tahun 1984-1988

No.	Jenis Alat-Alat Pertanian	Jumlah				
		1984	1985	1986	1987	1988
1	Pengolahan Lahan					
	Hand Tractor Mini Tractor	9 9	16 7	14 5	45 2	59 1
2	Pemberantasan Hama					
	Hand Sprayer	2.824	2.535	3.322	3.239	3.895
	Mis Blower	12	9	1	12	10
	Emposan Power Sprayer Lain-lain	77 - 128	112 - 3	106 3 -	126 - -	168 - -
3	Pengolahan Padi					
	Perontok Padi Pembersih Gabah	1.578 -	1.425 12	2.030 -	1.931 -	2.408 -

	Pengosoh Beras Rice Mill Unit	38 291	45 241	31 297	- 316	- 330
4	Pompa Air	74	76	49	79	95

Sumber: Diolah dari Bappeda & Kantor Statistik Karanganyar Tahun 1984-1988

Pada akhir tahun 1980-an, pemerintah Kabupaten Karanganyar menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1979 seiring dengan berkembangnya perusahaan penggilingan padi di pedesaan. Dalam peraturan tersebut, perusahaan penggilingan padi dikenakan biaya retribusi sebesar 500 rupiah (per daya kuda) setiap tahun. Sebelum maraknya berdiri perusahaan penggilingan padi, jasa penyediaan penggilingan padi baru disediakan di setiap KUD (*Peraturan Daerah Nomor 13, 1979:1-2*). Dengan berkembangnya tempat-tempat penggilingan padi, praktis membuat pekerjaan tradisional masyarakat pedesaan sebagai buruh *nutu* perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Di samping itu, terdapat hal yang menarik bahwa masih dilestarikannya nilai budaya yang terkandung dalam *me-nutu* padi oleh masyarakat petani kecil pedesaan. Nilai budaya tersebut yaitu "*sathitik sing penting nyukupi bateh, ngelingi mangsa larang panga*". Bagi petani kecil, selain hasil panen yang masih harus dibagi untuk kebutuhan pangan keluarga dan keperluan dijual, sebagian panen disimpan di *grobogan* (wadah untuk menyimpan gabah kering) sebagai cadangan dalam menghadapi masa paceklik. Dengan demikian, para petani kecil pedesaan setelah selesai panen tidak langsung menggilingkan semua hasil panennya (Wawancara dengan Sardjono, 11 September 2019).

Tersedianya alat-alat pertanian (arit, cangkul), pupuk kimia buatan (Urea, TSP, ZA), pestisida (Diazinon, Foradan, Sefidol), dan berbagai jenis varietas bibit unggul (Unggul Lokal, IR 36, Pelita Sungget, Bengawan, dan Cisadane) di KUD dan toko-toko pertanian banyak mewarnai dalam kegiatan pertanian padi di pedesaan Kabupaten Karanganyar. Penggunaan berbagai teknologi baru tersebut seringkali masih menimbulkan ketidakpastian yakni berkaitan dengan peningkatan hasil produksi yang akan dicapai. Hal tersebut

disebabkan oleh perubahan penggunaan teknologi baru menimbulkan ongkos usaha tani yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi pertanian dalam sistem pertanian tradisional. Dengan demikian, banyak sebagian petani kecil di Kabupaten Karanganyar yang mempertimbangkan betul penggunaan teknologi baru dalam mendukung kegiatan usaha taninya. Walaupun demikian, berbagai macam teknologi baru tersebut banyak dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan petani bagi perkembangan produksi padi terutama penggunaan bibit unggul dan pupuk kimia buatan (Wawancara dengan Hadi Paiman, 29 Juli 2019).

Banyak pandangan yang menempatkan bahwa petani tradisional yang sebelumnya mengolah lahan pertanian secara sederhana, kemudian beralih menggunakan teknologi baru (bibit unggul, pupuk kimia buatan, pestisida, dan sebagainya) dikategorikan sebagai *rational peasant*. Selama ini pengertian petani rasional identik dengan gagasan Samuel L. Popkin melalui *rational choice* (memperbesar produksi & mengejar keuntungan). Digunakannya teknologi baru oleh masyarakat petani Kabupaten Karanganyar dalam mengolah tanah pertanian disebabkan oleh pengaruh struktural (kebijakan pemerintah). Pengaruh tersebut dibuktikan oleh adanya peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan penggunaan teknologi baru guna menunjang keberhasilan revolusi hijau. Selain itu, kondisi masyarakat petani Kabupaten Karanganyar yang sebagian besar berada dibawah garis kemiskinan dengan kepemilikan tanah dibawah 0,5 hektar lebih berorientasi mengamankan hasil produksinya untuk mencukupi kebutuhan keluarga tani agar terhindar dari bahaya kekurangan pangan (Wawancara dengan Suharno, 11 September 2019). Dengan demikian, sebagian besar masyarakat petani pedesaan Kabupaten Karanganyar lebih dekat (tergolong) melalui sebutan *peasant*, bukan *farmer*.

Tabel 6. Luas Panen dan Produksi Padi Sawah dan Padi Gogo di Dati II Kabupaten Karanganyar Tahun 1984-1998

Tahun	Luas Panen Padi (Ha)		Hasil Produksi (Ton)	
	Padi Sawah	Padi Gogo	Padi Sawah	Padi Gogo
1984	33.863	2.474	221.231	6.185
1985	37.554	2.091	221.299	-
1986	34.068	2.849	183.808	6.487
1987	35.362	2.139	196.896	4.888
1988	36.034	2.433	210.109	6.083
1989	38.649	2.214	243.410	6.710
1990	37.124	1.393	222.423	3.939
1991	36.659	1.618	219.107	4.822
1992	38.335	1.556	226.476	4.851
1993	39.307	1.175	230.031	3.525
1994	35.845	1.261	222.457	3.838
1995	37.840	1.814	217.793	5.514
1996	38.841	1.792	231.698	5.118
1997	39.434	882	228.128	2.652
1998	40.261	1.120	241.934	4.047

Sumber: Diolah dari Bappeda & Kantor Statistik Karanganyar Tahun 1984-1998

Hal lain ditunjukkan oleh adanya kekhawatiran masyarakat petani kecil pedesaan Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi kondisi rawan krisis menyebabkan timbulnya etika subsistensi yang diwujudkan melalui keberadaan lumbung-lumbung paceklik. Kondisi tersebut seperti ditunjukkan oleh kelompok tani Manteb Dusun Katak Desa Gondangmanis Kecamatan Karangpandan. Pada tahun 1986, kelompok tani Manteb berhasil membangun lumbung paceklik permanen ukuran 3 x 8 m dengan biaya swadaya murni masyarakat sebesar dua juta rupiah. Biaya pembangunan lumbung paceklik tersebut didapatkan dari hasil penjualan gabah kelompok tani Manteb. Pembangunan tersebut dimaksudkan sebagai tempat penyimpanan gabah dari persatuan kelompok tani untuk menanggulangi adanya

kemungkinan bahaya paceklik (kekurangan pangan) yang menimpa (*Gema Pancasila* Nomor 11, 1986:27). Perkembangan sebelumnya, berdasarkan hasil sensus pertanian tahun 1973 menunjukkan terdapat 147 lumbung paceklik yang tersebar di daerah pedesaan Kabupaten Karanganyar (Bappeda & Kantor Statistik Karanganyar, 1973:33). Dengan demikian, penggunaan teknologi baru dalam usaha tani dan keberadaan lumbung paceklik merupakan *moral choice* dalam upaya menghindarkan kehidupan keluarga petani dari bahaya kekurangan pangan.

Kedua, meningkatnya pendapatan hasil produksi padi petani. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah dengan dilaksanakannya kebijakan revolusi hijau sejak Pelita I telah berhasil menaikkan produksi beras, sehingga swasembada beras berhasil dicapai pada tahun 1984. Berdasarkan data dalam tabel 6 menunjukkan bahwa perkembangan produksi padi di Kabupaten Karanganyar masih tetap terjaga sampai tahun 1998 dengan hasil produksi sebesar 245.981 ton dengan luas panen mencapai 41.381 hektar. Peningkatan produksi padi di Kabupaten Karanganyar tidak lepas dari penerapan teknologi baru dalam usaha tani. Munculnya berbagai varietas bibit padi unggul, telah mendorong para petani Kabupaten Karanganyar untuk menambah frekuensi penanaman padi dalam setahun. Dari kondisi sebelumnya dalam setahun hanya dilakukan satu kali atau maksimal dua kali penanaman padi, kemudian bertambah menjadi tiga kali setahun. Hal tersebut ditunjang dengan keberadaan bangunan irigasi yang dapat menyuplai kebutuhan air selama masa penanaman padi. Kondisi tersebut benar-benar dirasakan masyarakat petani di Desa Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Pada tahun 1983, masyarakat petani Desa Mojogedang dapat melakukan panen padi tiga kali dari kondisi sebelumnya hanya dapat panen dua kali dalam setahun melalui tanah sawah seluas 176,5 hektar (*Gema Pancasila* Nomor 15, 1983:18).

Meningkatnya hasil produksi padi juga berpengaruh terhadap meningkatnya taraf pendidikan masyarakat Kabupaten Karanganyar khususnya petani di pedesaan.

Terbebasnya masyarakat Kabupaten Karanganyar dari tiga buta (buta aksara, buta berbahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar) pada tahun 1987, mendorong berkembangnya kesadaran pentingnya pendidikan sekolah (*Gema Pancasila* Nomor 10, 1987:6). Sampai dengan akhir tahun 1998, jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar yang mampu menamatkan Sekolah Dasar berjumlah 281.287 jiwa, disamping mampu menekan angka penduduk putus sekolah berjumlah 36.548 jiwa dan penduduk tidak mengenyam pendidikan berjumlah 56.876 jiwa. Hal tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah daerah dalam memperbaiki taraf kehidupan masyarakat Kabupaten Karanganyar melalui pendidikan sekolah dan program wajib belajar (Wajar) 6 tahun.

D. SIMPULAN

Lahirnya kebijakan revolusi hijau merupakan upaya pemerintah Orde Baru dalam menanggulangi krisis beras pada pertengahan tahun 1960-an. Melalui penggunaan teknologi baru berupa bibit unggul, pupuk dan obat-obatan kimia, serta alat-alat pertanian modern berpengaruh besar dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan revolusi hijau diberbagai daerah. Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu daerah lumbung produksi padi di Jawa Tengah turut menerapkan kebijakan swasembada tersebut. Walau penerapan revolusi hijau membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan hasil produksi padi petani, tetapi kondisi tersebut belum mampu mengantarkan petani pedesaan Kabupaten Karanganyar untuk dapat disebut sebagai “*farmer*”, justru sebaliknya para petani pedesaan tersebut masih lebih dekat dengan sebutan “*peasant*”. Sebab, sebagian besar kehidupan masyarakat petani pedesaan Kabupaten Karanganyar merupakan petani kecil dan hidup di bawah garis kemiskinan, dengan jumlah Petani Setengah Kenceng, Ngindung, Magersari, dan Gundul lebih besar dibandingkan jumlah Petani Kenceng. Para petani pedesaan tersebut dalam kegiatan bertaniya lebih berorientasi untuk mengamankan hasil produksinya untuk mencukupi kebutuhan keluarga tani, serta

menyimpan sebagian hasil panennya ke dalam lumbung-lumbung paceklik agar terhindar dari bahaya krisis pangan.

Penulis melihat bahwa kajian mengenai revolusi hijau memiliki peranan penting, tidak hanya dalam melihat situasi internal di pemerintah pusat, akan tetapi juga penerapannya di daerah. Hal ini mengingat, revolusi hijau merupakan kebijakan swasembada pangan terbesar pertama kali yang dilakukan secara masif oleh pemerintah Indonesia pasca krisis nasional tahun 1965. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan swasembada tersebut dapat menjadi gambaran penting dalam melihat keadaan, dan respon yang diberikan oleh masyarakat petani di pedesaan. Walau cukup banyak ditemukan kajian serupa, khususnya sepanjang era tahun 1970-an sampai 1990-an, akan tetapi penulis menyakini bahwa kajian tentang revolusi hijau ini masih belum selesai dan cukup relevan dengan kondisi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan demikian, penulis berharap hasil kajian ini dapat memantik munculnya kajian serupa selanjutnya tentunya dengan kebaruan yang dimiliki serta menjadi salah satu sumbangan penting dalam memahami persoalan sosial ekonomi pedesaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Keputusan Presiden* Nomor 62 Tahun 1983 Tentang Badan Pengendali Bimas. Diakses dari <https://jdih.setkab.go.id/> pada 12 Oktober 2019.
- Peraturan Pemerintah* Nomor 23 Tahun 1982 Tentang Irigasi. Diakses dari <https://jdih.setkab.go.id/> pada 14 Oktober 2019
- Instruksi Presiden* Nomor 10 Tahun 1976 Tentang Usaha-Usaha Khusus Dalam Meningkatkan Produksi Pangan Tahun 1976. Diakses dari <https://jdih.setkab.go.id/> pada 14 Oktober 2019.
- Instruksi Presiden* Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD). Diakses dari

- <https://jdih.setkab.go.id/> pada 19 Juli 2019.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Karanganyar. Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perijinan dan Retribusi Penggilingan Padi. Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1983 Tentang Tebasan Hasil Bumi. Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.
- Bappeda & Kantor Statistik Karanganyar. *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 1973, 1974, 1975, 1978, 1983, 1984-1998*.
- Buku**
- Arifin, Bustanul. (1994). *Pangan Dalam Orde Baru*. Jakarta: KOPINFO.
- Booth, Anne & McCawley, Peter. (1987). *Perekonomian Indonesia Sejak Pertengahan Enam Puluhan*, dalam Booth, Anne & McCawley, Peter (peny). (1987). *Ekonomi Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Departemen Pertanian. (1978). *10 Tahun Departemen Pertanian (1968-1978)*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- _____. (1987). *5 Tahun (1981-1986) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Fauzi, Noer. (1999). *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gottchalk, Louis. (1985). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hutabarat, Arifin. (1974). *Usaha Mengatasi Krisis Beras*. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mears, Leon. A. & Moeliono, Sidik. (1987). *Kebijaksanaan Pangan*, dalam Booth, Anne & McCawley, Peter (peny). (1987). *Ekonomi Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Moertopo, Ali. (1975). *Buruh Tani dalam Pembangunan*. Jakarta: CSIS.
- Mubyarto. (1989). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Rahardjo, M. Dawam. (1986). *Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja*. Jakarta: UI.
- Sajogya. (1974). *Modernization Without Development in Rural Java*, a Paper Contributed to The Study on Changes in Agrarian Structures, Organized by FAO of The U.N., 1972-1973. Bogor: Bogor Agricultural University.
- Scott, James C. (1981). *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- _____. (1993). *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: LP3ES.
- Taneko, Soleman. B. (1990). *Struktur dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koran dan Majalah**
- Carya Dharma Praja Mukti No. 39. (1969, Juli). *Ke Daerah Pengadaan Pangan dan Bimas Gotong Rojong di Djateng*. Kokarmendagri Jawa Tengah.
- Jawa Pos. (1985, 14 November). (Foto) *Presiden Soeharto Akan Berpidato Pada Sidang Umum Ke-23 Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) Mewakili Negara Berkembang*.
- Kompas. (1971, 3 Januari). *Hama Tikus Serang Kabupaten Karanganyar*.
- _____. (1984, 19 Oktober). *Produksi Beras 1984 Naik Menjadi 25,497 Juta Ton*.
- _____. (1985, 10 Mei). *Afrika Masih Kurang Pangan*.
- Suara Bengawan. (1986, 20 Juni). *Menyingkap Prestasi Kabupaten Karanganyar, Berharap Duduki Teratas Pengadaan Pangan Jateng*.
- Gema Karanganyar No. 3. (1982, Mei). *Peresmian Proyek Kecamatan Terpadu*. Departemen Penerangan RI. Kabupaten Karanganyar.
- Gema Pancasila No. 17. (1981, Mei-Juni). *Program KUD lan KMD: Cukup Kasil Ing*

- Jateng*. Departemen Penerangan RI. Kabupaten Karanganyar.
- Gema Pancasila* No. 9. (1982, November). *Gubernur Soepardjo: Aja Salah Arah*. Departemen Penerangan RI. Kabupaten Karanganyar.
- Gema Pancasila* No. 4. (1982, Juni). *Tunggakan Inpres X "Kari 29%"*. Departemen Penerangan RI. Kabupaten Karanganyar.
- Gema Pancasila* No. 8. (1982, Oktober). *Kontak Tani Blora ke Tunggulrejo dan Ngunggak Temu Wicara Kontak Tani: Tukar Pengalaman*. Departemen Penerangan RI. Kabupaten Karanganyar.
- Gema Pancasila* No. 15. (1983, Mei). *Insektisida Utawa Obat Gegremet dan DAM Kedung Bang Nikelake Panenan Dadi Ping Telu Setahun*. Departemen Penerangan RI. Kabupaten Karanganyar.
- Gema Pancasila* No. 11. (1986, Maret). *Kelompok Tani Bangun Lumbung Paceklik*. Departemen Penerangan RI. Kabupaten Karanganyar.
- Gema Pancasila* No. 10. (1987, Januari). *Karanganyar Bebas Tiga Buta*. Departemen Penerangan RI. Kabupaten Karanganyar.
- Rahardjo, Dawam. (1984, 24 September). *Revolusi Hijau Bukan Pengganti Reforma Agraria*, *Kompas*.
- Tjondronegoro, Sediono M.P. (1984, 17 September). *Dari Revolusi Teknologi ke Polarisasi di Pedesaan*, *Kompas*.
- Sartono, Petani Desa Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar Tahun 1985-sekarang. Tanggal 28 Juli 2019.

Wawancara

- Suharno, Petugas Dinas Pertanian Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura (TPH) Kabupaten Karanganyar Tahun 1986-2016. Tanggal 11 September 2019.
- Paiman, Petugas Dinas Pertanian Bidang Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Kabupaten Karanganyar Tahun 1984-sekarang. Tanggal 29 Juli 2019.
- Hadi Paiman, Petani Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Tahun 1965-sekarang. Tanggal 29 Juli 2019.
- Sardjono, Petani Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo Tahun 1969-sekarang. Tanggal 11 September 2019.

KETENTUAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL KALPATARU

1. Naskah berbahasa Indonesia yang disempurnakan bertemakan kesejarah yang meliputi hasil penelitian sejarah, pengajaran sejarah dan penelitian kebudayaan.
2. Naskah harus asli dan belum pernah dimuat dalam media lain. Naskah dapat berupa hasil penelitian/artikel kajian konseptual yang ditulis oleh perorangan dan atau kelompok.
3. Naskah ditulis dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan penulisan artikel ilmiah menggunakan bahasa Indonesia yang baku, berupa ketikan, beserta soft file dalam CD-RW atau dengan mengirimkan email pada redaksi jurnal Kalpataru dengan alamat jurnalkalpatarusejarah@gmail.com, spasi tunggal, jenis huruf arial narrow ukuran 12, dengan panjang naskah antara 8-15 halaman pada kertas A4.
4. Artikel hasil penelitian memuat:
 - JUDUL** : **XXX (HURUF KAPITAL)**
 - Nama Penulis** : **(disertai jabatan, institusi, dan email)**
 - Abstrak** : (Bahasa Indonesia yang memuat 100-200 kata diikuti kata kunci, dengan jenis huruf arial narrow dan ukuran huruf 11 serta dicetak miring).
 - A. PENDAHULUAN** : (memuat latar belakang masalah, tinjauan pustaka secara ringkas, masalah penelitian, dan tujuan penelitian).
 - B. METODE PENELITIAN**
 - C. HASIL DAN PEMBAHASAN**
 - D. SIMPULAN** : (berisi simpulan).
 - DAFTAR PUSTAKA** : (berisi pustaka yang dirujuk dalam uraian naskah).
5. Artikel Kajian Konseptual memuat:
 - JUDUL** : **XXX (HURUF KAPITAL)**
 - Nama Penulis** : **(disertai jabatan, institusi, dan email)**
 - Abstrak** : (Bahasa Indonesia yang memuat 100-200 kata diikuti kata kunci, dengan jenis huruf arial narrow dan ukuran huruf 11 serta dicetak miring).
 - PENDAHULUAN** : (memuat latar belakang masalah, tinjauan pustaka secara ringkas, masalah penelitian, dan tujuan penelitian).
 - Sub Judul** : Sesuai dengan kebutuhan (tanpa numbering).
 - Simpulan** : (berisi simpulan dan saran).
 - DAFTAR PUSTAKA**
6. Referensi sumber dalam teks artikel ditulis dengan menggunakan side note, contoh (Jalaludin, 1991:79); sementara penulisan daftar pustaka disusun dengan ketentuan. Nama pengarang. Tahun terbit. Judul (dicetak miring). Kota terbit: Nama Penerbit. Contoh: Koentjaraningrat. 2010. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djembatan. Mencantumkan minimal 10 sumber pustaka dan daftar pustaka hanya memuat pustaka/sumber yang dirujuk dalam uraian dan disusun menurut abjad tanpa nomor urut.
7. Naskah yang dimuat akan disunting kembali oleh redaksi tanpa mengubah isinya.
8. Naskah yang ditolak (tidak bisa dimuat) akan dikirim kembali ke penulis dengan pemberitahuan tertulis dari redaksi atau melalui email.
9. Penulis yang naskahnya dimuat akan mendapat 1 (satu) majalah nomor yang bersangkutan.
10. Kontak person: Muhamad Idris (081271498618); Eva Dina Chairunisa (082281267851); Jeki Sepriady (085269261780).
11. Website: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Kalpa>